

# Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014



## KEDEPUTIAN BIDANG PENELITIAN DAN KERJASAMA STANDARDISASI



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**  
2015



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENELITIAN DAN  
KERJASAMA STANDARDISASI**

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
2015**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PENGANTAR .....	ii
BAB I – PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan tujuan .....	1
C. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi.....	1
D. Isu-isu strategis yang dihadapi .....	7
BAB II – PERENCANAAN KINERJA .....	9
BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran .....	35
BAB IV – PENUTUP .....	37
LAMPIRAN A Penetapan Kinerja Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi .....	39
LAMPIRAN B Tugas pokok dan fungsi Deputi bidang Penelitian Dan Kerjasama Standardisasi.....	41
Tabel 1 – Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2012-2014 Deputi PKS .....	9
Tabel 2 – Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Deputi PKS Tahun 2014 .....	10
Tabel 3 – Pencapaian Target Deputi PKS Tahun 2014.....	18
Tabel 4 – Target dan Realisasi Penetapan SNI dari Tahun 2010 s/d 2014 .....	19
Tabel 5 – Tabulasi Rekomendasi MTPS Tahun 2013 dan 2014 .....	20
Tabel 6 – Tabulasi Pembinaan SDM Perumusan SNI Tahun 2013 dan 2014 .....	22
Tabel 7 – Penerima Anugerah Herudi Technical Committee Award (HTCA) Tahun 2008-2014 .....	23
Tabel 8 – Evaluasi Kinerja Komtek/SubKomtek SNI Tahun 2013 dan 2014 .....	24
Tabel 9 – Pelaksanaan Fasilitasi Harmonisasi SNI Tahun 2013 dan 2014.....	25
Tabel 10 – Tabulasi Kegiatan Penjajakan dan Penandatanganan Kerjasama dengan Mitra Kerja (2012-2014).....	26
Tabel 11 – Tabulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemda (2012-2014) .....	27
Tabel 12 – Tabulasi Tanggapan Indonesia atas Draft Standar ISO (2012-2014) .....	30
Tabel 13 – Tabulasi Tanggapan Indonesia atas Draft Standar IEC (2012-2014).....	31
Tabel 14 – Status Keanggotaan Indonesia di ISO (2012 – 2014) .....	32
Tabel 15 – Status Keanggotaan Indonesia di IEC (2012 – 2014) .....	32
Tabel 16 – Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2014 Deputi PKS - BSN .....	35
Tabel 17 – Target dan Realisasi Kinerja Deputi PKS Tahun 2014.....	37
Gambar 1 – Struktur Organisasi Deputi PKS .....	2
Gambar 2 – Perbandingan penetapan SNI per tahun (2010-2014).....	19
Gambar 3 – Distribusi usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komite Teknis) tahun 2014 .....	21
Gambar 4 – Status pemberian tanggapan dokumen draft standar ISO .....	31
Gambar 5 – Status pemberian tanggapan dokumen draft standar IEC.....	31
Gambar 6 – Status keanggotaan Indonesia dalam TC/SC ISO .....	32
Gambar 7 – Status keanggotaan Indonesia dalam TC/SC IEC.....	33

---

## PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang hanya atas hidayah dan tuntunan yang diberikan-Nya kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan Kedeputian PKS, sehingga pencapaian kinerja unit kerja Kedeputian PKS tahun 2014 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999. Selain itu laporan ini disusun oleh Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada lembaga pembina Badan Standardisasi Nasional yang merupakan instansi induk dari Kedeputian PKS.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kedeputian PKS sepanjang tahun 2014 pada umumnya dan dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih sempurna di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pembaca dan pengguna dokumen ini.

Jakarta, Februari 2015  
Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama  
Standardisasi - RSN



Kuku S. Achmad  
NIP. 19650210 199003 1 002

## BAB I - PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik pula. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Kedeputian I BSN - Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSN Tahun 2015 sebagai perwujudan kewajiban Deputi PKS dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Deputi PKS di tahun yang akan datang kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi PKS berpedoman pada perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan oleh BSN, untuk menjamin bahwa pencapaian visi, misi, serta tujuan Deputi PKS mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi BSN secara keseluruhan.

### B. Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan LAKIP Deputi PKS adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Deputi PKS.

Tujuan penyusunan LAKIP Deputi PKS adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Deputi PKS. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Deputi PKS khususnya dan BSN pada umumnya.

### C. Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

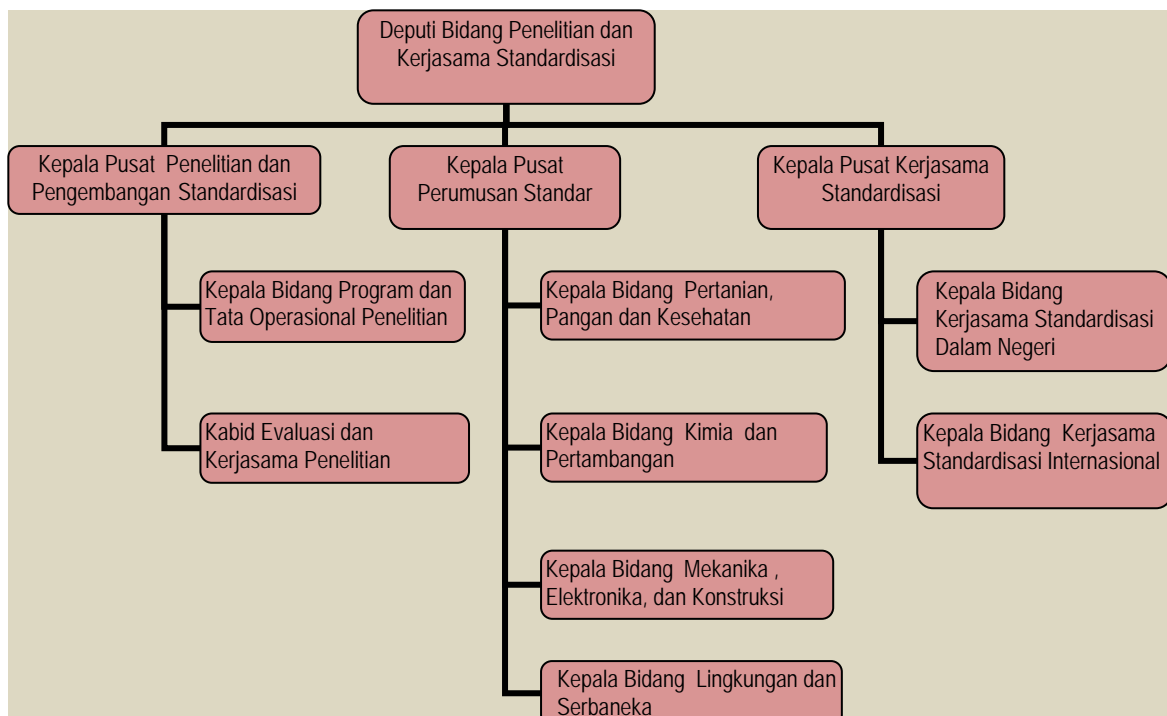
Secara struktural Deputi PKS mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi.

Deputi PKS yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) Kedeputian yang ada di lingkungan BSN, membawahi tiga unit kerja yaitu:

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi,
2. Pusat Perumusan Standar, dan
3. Pusat Kerjasama Standardisasi.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Deputi PKS mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- d. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



**Gambar 1 – Struktur Organisasi Deputi PKS**

Dalam organisasi BSN, Deputi PKS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan program pengembangan standar, dimana tugas dan tanggung jawab

teknisnya dilaksanakan oleh Pusat Perumusan Standar, serta didukung oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi dan Pusat Kerjasama Standardisasi.

Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan Deputi PKS mengarah pada kebijakan pengembangan standar nasional yang didukung dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan standardisasi serta pelaksanaan berbagai kerjasama di bidang standardisasi, baik lingkup nasional maupun internasional. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, yang kemudian diperkuat menjadi UU 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dari Deputi PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS) mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang pemberlakuannya ditetapkan melalui Peraturan Kepala BSN. Istilah Komite Teknis merupakan amanah dari UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT) Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan Komtek/SubKomtek.

Untuk melaksanakan kegiatan perumusan SNI, telah ditetapkan beberapa PSN sebagai berikut:

- **PSN 01:2007 *Pengembangan Standar Nasional Indonesia***  
menguraikan tentang tata cara pengembangan SNI, meliputi tata cara perumusan SNI mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus Komtek/SubKomtek, jajak pendapat, penetapan dan publikasi, serta tata cara kaji ulang dalam rangka pemeliharaan SNI.
- **PSN 02:2007 *Pengelolaan PT Perumusan SNI***  
menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas/tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/SubKomtek perumusan SNI.
- **PSN 03.1:2007 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI,***  
menguraikan tentang tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai identik/modifikasi/tidak ekivalen (IDT/MOD/NEQ).

- **PSN 03.2:2014 *Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya - Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI,***  
menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.
- **PSN 04:2006 *Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI***  
menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.
- **PSN 05:2006 *Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI***  
menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.
- **PSN 06:2007 *Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis (DT)***  
Menguraikan tata cara pemberian nomor sejak RSNI sampai ditetapkan menjadi SNI, namun tidak termasuk penomoran PSN.
- **PSN 07:2012 *Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum***  
menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.
- **PSN 08:2007 *Penulisan SNI***  
menguraikan tentang tata cara penulisan SNI, struktur standar, mulai dari halaman sampul hingga halaman akhir, bagian dari struktur standar yang sifatnya wajib ada dalam penulisan rancangan SNI dan yang sifatnya opsional, sesuai kebutuhan.
- **PSN 10:2012 *Adopsi standar ASTM menjadi SNI,***  
menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.

Pusat Perumusan Standar (PPS) bertanggungjawab penuh dalam pengorganisasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh sumber daya yang terlibat dalam pengembangan SNI, mulai dari seluruh staf yang ada di lingkungan PPS, konseptor Rancangan SNI (RSNI), editor RSNI, tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI, hingga sekretariat pengelolaan Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang ada di berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK). Oleh karena itu penguatan koordinasi dan sinergi dengan K/LPNK, yang dijabarkan dalam



berbagai program dan kegiatan PPS, menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja program perumusan SNI.

Selain itu PPS juga bertanggungjawab dalam menyusun konsep rancangan PSN yang baru atau revisi PSN yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dari referensi acuan internasional yang digunakan maupun karena tuntutan dan dinamika yang berkembang dari para pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia.

Dengan demikian tersusunnya SNI yang bermutu dan sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan serta selaras dengan rencana strategis BSN perlu ditunjang dengan program kerja dan pencapaian kinerja yang baik dari PPS selaku unit kerja yang mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan perumusan SNI. Oleh karena itu, PPS mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Deputi PKS dan kinerja kelembagaan BSN secara keseluruhan.

Salah satu unsur standardisasi adalah pengembangan standar. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Puslitbang) BSN sebagai salah satu unit kerja di Deputi PKS sangat penting keberadaannya dalam memberikan kontribusi untuk pengembangan standar, melalui penelitian dan pengembangan standardisasi. Program penelitian dan pengembangan standardisasi perlu diarahkan pada terwujudnya ketersediaan SNI sesuai kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan. Kebijakan mengenai adanya harmonisasi standar dengan standar internasional dan kebutuhan perumusan SNI yang spesifik sesuai karakter Indonesia pada pengembangan standar memerlukan adanya masukan dari hasil penelitian atau kajian yang dilakukan secara ilmiah dengan analisis yang handal. Puslitbang perlu melakukan penelitian yang mendukung kebutuhan pengembangan standar yang terkait dengan kebijakan nasional maupun kesepakatan regional atau internasional. Puslitbang juga diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan standar baru sesuai kebutuhan pasar. Peran Puslitbang menjadi penting seiring kebutuhan pengembangan standar yang mampu menjadi *tool* dalam menghadapi implementasi perjanjian *Trade Barrier to Trade (TBT)* dalam perdagangan di *World Trade Organization (WTO)*.

Hasil penelitian yang berkualitas juga perlu didukung adanya peneliti bidang standardisasi yang kompeten dengan jumlah yang cukup. Pada tahun 2014 jumlah peneliti BSN tercatat berjumlah 13 peneliti aktif terdiri dari 1 (satu) Peneliti Utama, 4 (empat) Peneliti Madya, 2 (dua) Peneliti Muda, dan 6 (enam) Peneliti Pertama. Peningkatan jumlah peneliti dari luar BSN yang berminat dalam penelitian bidang standardisasi perlu diupayakan, mengingat peningkatan jumlah peneliti bidang

standardisasi di internal BSN sangat kecil yaitu sekitar 2 peneliti baru (peneliti pertama) per tahun.

Selain dukungan penelitian, untuk menghasilkan SNI yang berkualitas, di dalam pengembangan SNI juga memerlukan dukungan kegiatan di bidang kerjasama standardisasi. Kerjasama standardisasi dikoordinasikan oleh Pusat Kerjasama Standardisasi yang merupakan salah satu unit di Deputi PKS. Kerjasama ini dilakukan baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerjasama merupakan salah satu unsur pendukung yang berperan dalam pengembangan standardisasi, terutama ketika melakukan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional.

Di tingkat nasional, kerjasama dilakukan dengan instansi teknis terkait, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia industri, dan konsumen dengan penekanan kepada penguatan aspek kesadaran akan pentingnya standar bagi peningkatan nilai tambah produk industri dan perlindungan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup bagi masyarakat luas selaku konsumen. Penggunaan produk bertanda SNI secara konsisten baik oleh dunia industri maupun masyarakat luas pada akhirnya akan mendukung perekonomian nasional dan memperkuat daya saing produk di era kompetisi perekonomian global yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Kerjasama internasional di bidang standardisasi meliputi kerjasama dengan forum pengembang standar dan forum kerjasama ekonomi global. Peran aktif dalam forum pengembang standar meliputi ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), dan CAC (*Codex Alimentarius Commission*). Partisipasi dalam forum ini ditujukan untuk mendukung pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar selaras dengan standar internasional serta merupakan upaya memperjuangkan kepentingan nasional maupun kepentingan sesama negara berkembang. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip perumusan standar internasional yaitu keterwakilan semua negara anggota sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Kerjasama ekonomi global melalui kerjasama perdagangan meliputi fora bilateral, regional dan multilateral. Kerjasama bilateral dimaksudkan untuk memfasilitasi kepentingan perdagangan ekonomi nasional dengan negara mitra. Dalam hal ini, kerjasama bilateral dilakukan dalam bentuk kerjasama antara dua negara, yaitu Indonesia dengan negara mitra, dimana BSN berpartisipasi sebagai bagian dalam kerjasama kedua negara tersebut. Dukungan BSN adalah melakukan kerjasama untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan badan standardisasi nasional di negara lain atau antara BSN dengan organisasi pengembang standar di negara lain.

Dalam konteks kerjasama regional, perjuangan kepentingan Indonesia dilakukan dalam forum ASEAN dan APEC. Selain itu juga forum standardisasi dan akreditasi regional dan internasional seperti PASC (*Pacific Area Standard Congress*), *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC), *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC), *International Accreditation Forum* (IAF), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) serta *World Trade Organization* (WTO) sebagai Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam kerjasama multilateral, UU No.7/1994 tentang ratifikasi keanggotaan Indonesia dalam WTO membawa konsekuensi bahwa Indonesia berkewajiban untuk mematuhi seluruh Perjanjian WTO dimana yang terkait dengan standardisasi adalah Perjanjian *Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT) atau hambatan teknis perdagangan. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengatur perdagangan produk dengan menerapkan peraturan teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan syarat tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan. Untuk menghindari hambatan teknis perdagangan maka pengembangan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan oleh anggota WTO harus mematuhi prinsip transparansi (melalui notifikasi), non diskriminasi, ekuivalensi, dan harmonisasi serta mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan serta organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO, yaitu antara lain adalah ISO, IEC, CAC, dan ITU (*International Telecommunication Union*).

#### **D. Isu-isu strategis yang dihadapi**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, penyediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas utama. Penyediaan SNI tersebut harus selaras dengan tujuan utama standardisasi di Indonesia untuk periode 2015-2019 yaitu: 1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, 2) Meningkatkan kepercayaan atas produk nasional di pasar domestik, dan 3) Membuka akses produk domestik ke pasar global.

Oleh karena itu SNI harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan para pemangku kepentingan dan harus mampu menjadi *tool* untuk dapat melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai lembaga standardisasi. Keberadaan Deputi PKS menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam menyusun kebijakan untuk

mewujudkan ketersediaan SNI yang sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja Deputi PKS akan mempengaruhi maju tidaknya perkembangan standardisasi, khususnya SNI di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan utama standardisasi yaitu melindungi masyarakat terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus tersedia SNI yang diperlukan dalam pencapaian tujuan tersebut melalui pemberlakuan secara wajib di dalam regulasi teknis. Oleh karena itu di dalam program pengembangan SNI secara nasional, kebutuhan-kebutuhan SNI yang diperlukan untuk penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian menjadi salah satu prioritas kegiatan Deputi PKS.

Seiring dengan kesepakatan perwujudan *ASEAN Economic Community (AEC) 2015*, peran standardisasi menjadi sangat strategis. Seluruh negara ASEAN telah menyepakati integrasi perdagangan untuk 12 sektor prioritas, dimana 6 sektor diantaranya memerlukan tersedianya standar yang harmonis. Ke 6 sektor tersebut adalah produk otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, produk elektronika dan kelistrikan, produk makanan siap saji dan produk perawatan kesehatan (obat, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan). Dari ke 6 sektor tersebut disepakati untuk mengharmonisasikan 270 standar nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Oleh karena itu harmonisasi standar di ASEAN ini menjadi salah satu tantangan utama Deputi PKS yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2015.

## BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) berpedoman pada perencanaan strategis yang disusun melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Renstra Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional 2010-2014 dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSN. Implementasi perencanaan strategis tersebut dijabarkan melalui kebijakan serta program kerja yang disusun setiap tahun. Pada tahun 2014, implementasi perencanaan strategis dijabarkan dalam Penetapan Kinerja BSN yang memuat penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi PKS TA 2014. Tabel 1 menguraikan sasaran strategis serta target Deputi PKS untuk kurun waktu tahun 2012 s/d 2014.

**Tabel 1 – Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2012-2014 Deputi PKS**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2012	Target 2013	Target 2014
1	Terlaksananya penelitian dan pengembangan standardisasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan melalui pemanfaatan kerjasama dan jejaring dengan lembaga litbang standardisasi	Jumlah penelitian standardisasi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan dan perkembangan perdagangan global	11	12	13
		Terlaksananya publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan standardisasi	- 2 kali penyelenggaraan PPIS - 3 kali terbitan jurnal standardisasi	- 2 kali penyelenggaraan PPIS - 3 kali terbitan jurnal standardisasi	- 2 kali penyelenggaraan PPIS - 3 kali terbitan jurnal standardisasi
2	Tercapainya SNI yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	Jumlah SNI yang dirumuskan	325	350	400
		Jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional	50	70	70

Tabel 1 – (lanjutan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2012	Target 2013	Target 2014
3	Tercapainya peningkatan pemanfaatan kerjasama di bidang standardisasi	Persentase draft standar internasional yang ditanggapi sesuai kepentingan nasional	100%	100%	100%
		Persentase MOU yang telah diimplementasikan	100%	100%	100%
		Persentase notifikasi draft regulasi teknis yang disampaikan	100%	100%	100%

Pada Tahun 2014 penetapan sasaran strategis Deputi PKS mengalami penyempurnaan dari yang telah ditetapkan sejak perubahan terakhir tahun 2012 seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 – Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Deputi PKS Tahun 2014

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014
1	Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	350
2	Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70 %
3	Tersedianya hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	Persentase kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	80 %

Berdasarkan perencanaan kinerja Deputi PKS untuk mencapai 3 sasaran yang sudah ditetapkan untuk tahun 2014 diperlukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut pada dasarnya dilaksanakan oleh unit-unit eselon 2 yang berada di Deputi PKS, yaitu Pusat Perumusan Standar, Pusat Kerjasama Standardisasi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi.

Rencana kinerja untuk mencapai target penyusunan RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar sejumlah 350, dilakukan beberapa tahapan yang meliputi kegiatan berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar.

Dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan melalui beberapa kegiatan dengan dua output utama, yaitu:

- a. Rekomendasi kebijakan dalam perumusan SNI yang disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil:
  - 1). Pembahasan usulan pembentukan Komtek dan SubKomtek baru,
  - 2). Pembahasan usulan penambahan ruang lingkup Komtek dan SubKomtek,
  - 3). Pembahasan perubahan/pembubaran Komtek dan SubKomtek,
  - 4). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek dan SubKomtek,
  - 5). Pembahasan usulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), baik yang merupakan PNPS judul baru, PNPS perpanjangan, PNPS terjemahan, PNPS revisi, atau pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.
- b. Penyusunan rancangan kebijakan dalam bentuk Pedoman Standardisasi Nasional (PSN). Rancangan kebijakan ini disusun dengan maksud agar PSN yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Kegiatannya meliputi penyusunan konsep, pembahasan internal, hingga pelaksanaan *Public Hearing* Rancangan PSN (RPSN) dengan para pemangku kepentingan.

2. Pengendalian proses perumusan SNI dan koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek.

Dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSN pengembangan SNI, agar tercapai output utama 350 RASNI. Kegiatan dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama yang terdiri dari:

- a. Koordinasi penyelesaian masalah PT/SPT  
Memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan, pembagian ruang lingkup, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.
- b. Pengendalian perumusan SNI  
BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komtek/SubKomtek

dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan TAS-QC.

c. Pemeliharaan SNI

Komtek/SubKomtek berkewajiban memelihara SNI yang termasuk dalam ruang lingkupnya melalui pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas dengan semangat *simpler, faster, better*, dengan melalui dua kegiatan utama untuk mencapai output 500 SDM perumusan SNI, yang terdiri dari:

a. Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI

Silabus yang perlu disusun antara lain:

- silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;
- silabus pembinaan editor RSNI;
- silabus pembinaan Tenaga Ahli Standardisasi (TAS); dan
- dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan TAS dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.

b. Penyelenggaraan pembinaan SDM perumusan SNI

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI yang terdiri dari :

1) Pembinaan konseptor Rancangan SNI

Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen, konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan dalam memfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi standar.

Pemahaman yang ingin dicapai dalam workshop ini meliputi:



- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International)*;
- Pemahaman pedoman terkait aspek keselamatan – Pencantuman dalam standar (ISO/IEC Guide 51:1999);
- Pemahaman pedoman untuk memperhatikan isu lingkungan dalam standar produk (ISO/IEC Guide 64:2008);
- Cara mengakses dokumen ISO, IEC, ASTM, SNI dan bagaimana cara mendapatkan dokumen acuan; dan
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).

## 2) Pembinaan editor RSNI

Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI, sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI, sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan. Pemahaman yang ingin dicapai meliputi :

- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International)*;
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).

## 3) Workshop Tenaga Ahli Standardisasi

Tenaga Ahli Standardisasi (TAS) merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk memonitor jalannya rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan

agar rapat konsensus dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop TAS sangat diperlukan agar TAS memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme perumusan dan penulisan SNI dan sarana tukar menukar pengalaman antar TAS-QC.

Sasaran pemahaman yang ingin dicapai antara lain :

- Pemahaman Kebijakan Pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar *American Society for Testing and Materials (ASTM International)*;
- Pemahaman ketentuan PSN 05 tentang Tenaga Ahli Standardisasi terbaru;
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08);
- Informasi aktual (ketentuan baru terkait pengembangan SNI);
- Tukar menukar informasi dan pengalaman dalam rapat konsensus (untuk penyegaran TAS);
- Simulasi (contoh) editing SNI dihubungkan dengan substansi SNI.

#### 4. Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja PT/SPT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSN, dengan rencana output 25 Komtek/SubKomtek telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional, melalui dua kegiatan utama yang terdiri dari:

##### a. Evaluasi kinerja PT/SPT

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam PSN terkait pengembangan SNI. Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan kesekretariatan Komtek/SubKomtek dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI, penyelesaian PNPS sampai dengan tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.

Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek terdiri dari:

- sosialisasi ke Komtek/SubKomtek,
- penyampaian form evaluasi kinerja ke Komtek/SubKomtek,
- *desk assessment*,

- kunjungan lapangan ke Komtek/SubKomtek,
- scoring penilaian terhadap Komtek/SubKomtek, serta
- pembahasan nomine dan penerima *Herudi Technical Comittee Award (HTCA)* oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar – MTPS.

b. Penganugerahan HTCA 2014

Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan HTCA kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kerjanya. Acara anugerah HTCA 2014 juga diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan Temu Komite Teknis Perumusan SNI dengan tema menyesuaikan acara Bulan Mutu Nasional tahun 2014. Proses penetapan nomine dan pemenang HTCA 2014 mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis dalam kurun waktu antara 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Maret 2014.

5. Fasilitasi Harmonisasi SNI

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi, terutama AEC 2015, khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang disepakati, dengan output 30 RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional, melalui satu kegiatan utama dalam bentuk dukungan pendanaan dalam rapat teknis dan rapat konsensus dari Komtek/SubKomtek yang RSNI-nya termasuk dalam prioritas yang harus diharmonisasikan.

Manfaat dari harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan produknya ke pasar internasional; mempercepat keberterimaan produk yang bertanda SNI; mempercepat aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta mempercepat proses pengujian dan sertifikasi.

Pada tahun 2014, rencana kinerja di bidang kerjasama standardisasi difokuskan pada memberikan rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional yang dapat digunakan dalam mendukung pengembangan SNI. Dalam hal ini ditargetkan 70 % dari rekomendasi yang dihasilkan dari berbagai kerjasama standardisasi yang dilakukan dapat mendukung pengembangan SNI dan menjadi masukan dalam program pengembangan standar secara nasional.

Dalam rangka mendukung pengembangan SNI, kegiatan kerjasama difokuskan kepada kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral serta tindak lanjut dan implementasi kesepakatan kerjasama di bidang standardisasi yang harus dipenuhi. Sebagai anggota organisasi pengembang standar ISO

dan IEC, kegiatan dilakukan dalam hal memberikan tanggapan Indonesia terhadap pengembangan standar internasional. Selain itu, kegiatan pengembangan standard dilakukan dengan mengacu kepada Annex 3- TBT-WTO Agreement tentang Petunjuk Pelaksanaan Yang Baik Untuk Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar (*Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*).

Sementara itu, rencana kinerja bidang penelitian dan pengembangan standardisasi tahun 2014 difokuskan untuk menghasilkan penelitian yang bermutu dan yang dapat mendukung pengembangan SNI sesuai kebutuhan pasar. Target yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah 80% penelitian yang dilakukan merupakan masukan bagi pengembangan SNI, yang diharapkan dapat menjadi input dalam penyusunan program pengembangan standar secara nasional.

Dalam menghadapi pemberlakuan kesepakatan pasar tunggal ASEAN atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang akan dimulai pada 1 Januari 2016, perlu dilakukan penelitian tentang kesiapan ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dalam rangka pencapaian harmonisasi standar antar negara ASEAN maupun dalam rangka saling pengakuan atas hasil penilaian kesesuaian (*Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Conformity Assessment*). Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kesiapan SNI dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) menghadapi pasar tunggal ASEAN (AEC) tahun 2015 dan diharapkan dapat memberikan protret ketersediaan SNI dan LPK dalam menghadapi AEC, sekaligus memberikan rekomendasi dalam pengembangan SNI untuk mencapai harmonisasi standar di tingkat ASEAN.

Adanya kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan SNI secara wajib pada berbagai produk juga perlu mendapat perhatian, karena pemberlakuan tersebut mensyaratkan hanya produk yang memenuhi SNI yang diijinkan beredar di pasaran, yang diduga memberikan dampak bagi industri dalam negeri maupun masyarakat. Bahwa di satu sisi pemerintah ingin melindungi warganya terhadap barang-barang yang dibeli dari bahaya kesehatan, keselamatan dan keamanan, di sisi lain diduga industri dalam negeri dapat mengalami penurunan kinerja, karena banyak barang dari luar negeri masuk dalam perdagangan Indonesia dan menjadi pesaing produk nasional. Terkait hal ini maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan dampak pemberlakuan SNI secara wajib terhadap perdagangan, K3L dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari pemberlakuan SNI wajib di Indonesia. Walaupun demikian penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan SNI yang telah diberlakukan wajib tersebut.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur fisik di Indonesia, di antaranya adalah pembangunan taman-taman kota, maka perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan standar fasilitas umum taman kota. Dari hasil pengamatan

lapangan ada kebutuhan untuk membuat standar untuk fasilitas taman kota dengan maksud agar penerapan standar terhadap fasilitas taman dapat mengurangi risiko dan mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan, misalnya tergores, terjatuh, terbakar hingga terpapar zat kimia berbahaya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebutuhan standar fasilitas taman kota di Indonesia dan pengembangannya, terutama yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3L), sehingga masyarakat sebagai pengguna dari taman kota merasa aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum pada taman kota tersebut.

### A. Capaian Kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Capaian kinerja Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS) tahun 2014 diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasinya seperti disajikan pada Tabel 3. Pada dasarnya capaian kinerja Deputi PKS merupakan akumulasi dari output yang dihasilkan oleh 3 unit di Deputi PKS yang secara komprehensif diwujudkan menjadi hasil (*semi outcome*) untuk mendukung salah satu tujuan BSN yaitu mengembangkan SNI sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan.

**Tabel 3 – Pencapaian Target Deputi PKS Tahun 2014**

Sasaran Strategis BSN	Sasaran Strategis Kedeputian PKS	Indikator Kinerja Kedeputian PKS	Target dan Realisasi Tahun 2014			Permasalahan/Kendala	Perbaikan/tindak lanjut
			Target	Realisasi	%		
1. Tersedianya SNI sesuai kebutuhan pasar 2. ....(dst)...	1 Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	1 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	350	356	102	Perlu peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan Komtek/Sub Komtek	Penguatan koordinasi dengan Komtek/SubKomtek
	2 Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	2 Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70%	70%	100	Kepentingan Indonesia dalam standardisasi internasional belum diakomodasi secara optimal	Rekomendasi perlu difokuskan pada standardisasi produk potensial Indonesia
	3 Tersedianya hasil kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan SNI	3 Persentase kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan SNI	80%	80%	100	Cakupan penelitian belum sepenuhnya menyediakan input untuk perbaikan kebijakan standardisasi nasional	Penelitian perlu difokuskan pada pra dan pasca implementasi kebijakan pengembangan dan penerapan SNI

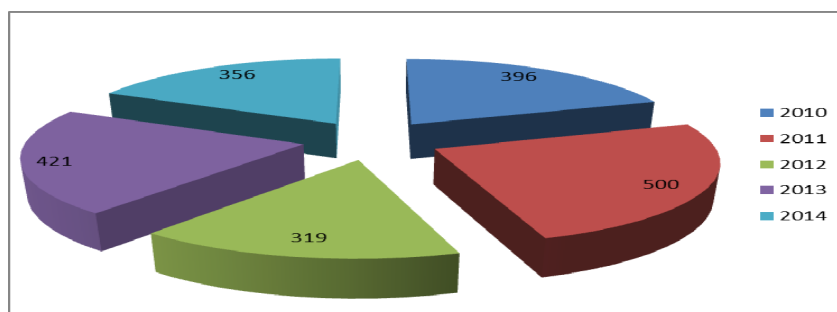
Target utama Deputi PKS pada tahun 2014, yaitu terwujudnya 350 Rancangan Akhir SNI (RASNI) yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, telah berhasil dipenuhi,

bahkan terlampaui menjadi 356 RASNI. Secara persentase capaian penyusunan RASNI adalah sebesar 102 % dari yang ditargetkan. Tabel 4 menggambarkan perbandingan capaian tahun 2014 dibandingkan dengan capaian 4 tahun sebelumnya selama satu siklus perencanaan strategis 2010-2014. Walaupun capaian kinerja pengembangan SNI tahun 2014 mencapai 102 %, tetapi data menunjukkan bahwa capaian 2014 tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah adanya pemotongan anggaran di tahun 2014.

**Tabel 4 – Target dan Realisasi Penetapan SNI dari Tahun 2010 s/d 2014**

Uraian	Tahun				
	2010 (+ APBN-P)	2011 (+ APBN-P)	2012 (Pemotongan Anggaran 23%)	2013	2014 (Penghematan)
Target SNI menurut Penetapan Kinerja	250	300	325	350	350
Realisasi penetapan SNI	396	500	319	421	356
Usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS)	519	498	519	631	636

Dari realisasi penetapan SNI dari tahun 2010-2014, terlihat bahwa capaian tertinggi adalah pada tahun 2011, yaitu 500 SNI.



**Gambar 2 – Perbandingan penetapan SNI per tahun (2010-2014)**

Keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan Deputi PKS tersebut dikontribusikan oleh pencapaian target dari tiap tahapan kegiatan yang ada di Pusat Perumusan Standar (PPS) sebagai salah satu unit di Deputi PKS sebagai berikut:

**1. Perumusan kebijakan pengembangan standar:**

- a. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam perumusan SNI, yang terdiri dari :
- 1). Persetujuan terhadap 9 usulan pembentukan Komite Teknis dan 1 Sub Komite Teknis baru, 4 di antaranya bersekretariat di BSN;
  - 2). Persetujuan terhadap usulan penambahan ruang lingkup dari 12 Komite Teknis;
  - 3). Persetujuan terhadap pembentukan/perubahan 10 (sepuluh) Komite Teknis, dan pembubaran 1 (satu) Komite Teknis 81-01 Industri Kaca dan Keramik, yang kemudian dipisah menjadi Komtek 81-01 Industri Kaca dan Komtek 81-02 Industri Keramik;
  - 4). Persetujuan usulan perubahan keanggotaan dari 50 Komite Teknis/Sub Komite Teknis;
  - 5). Persetujuan 636 usulan PNPS, meliputi 349 judul baru (termasuk 31 judul PNPS fasilitasi), 97 judul PNPS perpanjangan, 17 judul PNPS terjemahan dan 142 judul PNPS revisi;
  - 6). Persetujuan pembatalan 37 judul PNPS dengan alasan tertentu.
- b. Tersusunnya Rancangan PSN, termasuk pelaksanaan *Public Hearing* RPSN, yang terdiri dari :
- 1). Revisi PSN 01 *Pengembangan Standar Nasional Indonesia*
  - 2). Revisi PSN 08 *Penulisan Standar Nasional Indonesia*

Sesuai dengan kebijakan yang ada maka Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS) yang beranggotakan para wakil dari pemangku kepentingan standardisasi, merupakan tim yang sangat penting di dalam memberikan rekomendasi kepada Kepala BSN terkait arah kebijakan pengembangan di Indonesia. Selama tahun 2014 melalui pertemuan dan rapat kerja yang dilakukan telah menghasilkan rekomendasi di bidang pengembangan SNI seperti yang tertera pada Tabel 5.

**Tabel 5 – Tabulasi Rekomendasi MTPS Tahun 2013 dan 2014**

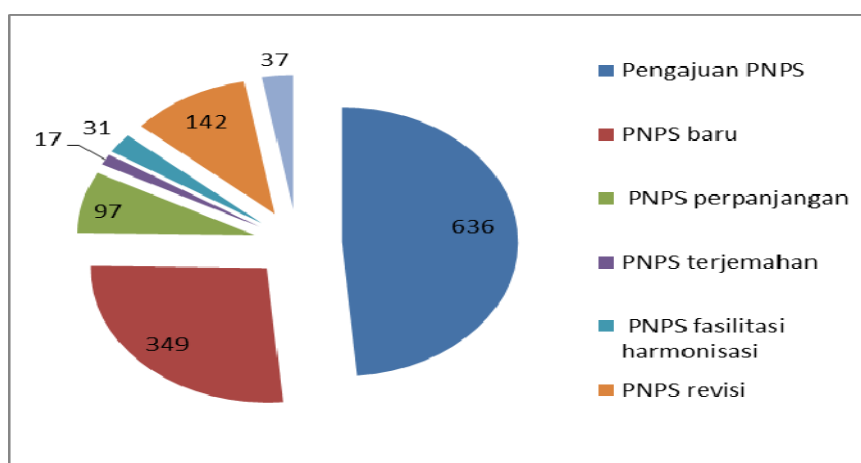
No	Rekomendasi	Tahun	
		2013	2014
1.	Komtek/SubKomtek		
	a. Pembentukan Komtek baru	9	10
	b. Pembentukan SubKomtek baru	-	1
	c. Perubahan/penambahan ruang lingkup	14	12
	d. Perubahan/penambahan keanggotaan	61	50
	e. Pembubaran Komtek/SubKomtek	15	1
2.	Pengajuan PNPS	623	636
	a. PNPS baru	545	349
	b. PNPS perpanjangan	10	97
	c. PNPS terjemahan	18	17
	d. PNPS fasilitasi harmonisasi	50	31
	e. PNPS revisi	-	142
	f. Pembatalan PNPS	-	37



Tabel 5 – (lanjutan)

No	Rekomendasi	Tahun	
		2013	2014
3.	Pengembangan PSN		
	a. PSN baru	1	-
	b. Revisi PSN	3	2

Pada tahun 2014, dari usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komtek) diketahui bahwa yang paling banyak merupakan usulan PNPS baru, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.



**Gambar 3 – Distribusi usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS yang diajukan oleh Komite Teknis) tahun 2014**

## 2. Pengendalian proses perumusan SNI dan koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek:

- Terlaksananya koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek.
- Terlaksananya pengendalian perumusan SNI melalui penugasan TAS-QC dalam rapat konsensus pembahasan RSNI-3 dimana pada tahun 2014 telah ditetapkan 356 SNI.
- Terlaksananya Pemeliharaan SNI, dalam bentuk identifikasi Komite Teknis/Sub Komite Teknis yang mempunyai ruang lingkup dari 3.084 SNI publikasi di bawah tahun 2003 yang mendesak (*urgent*) untuk dikaji ulang.

## 3. Pembinaan SDM Perumusan SNI:

- Tersusunnya silabus pembinaan SDM perumusan SNI untuk pembinaan konseptor RSNI, editor RSNI, TAS-QC dan dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan TAS dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.

- b. Terlaksananya workshop pembinaan SDM perumusan SNI, berupa 10 kali workshop konseptor Rancangan SNI yang dilaksanakan secara kolektif maupun di kantong-kantong konseptor RSNI, dengan perincian sebagai berikut:
- 1 kali penyelenggaraan workshop oleh BSN
  - 3 kali penyelenggaraan *in house training* di Kementerian Teknis
  - 6 kali workshop dilaksanakan secara *sharing* dengan Kementerian/LPNK pembina sekretariat Komite Teknis/ Sub Komite Teknis
- c. Terlaksananya 1 kali workshop pembinaan editor RSNI, dengan mengundang 50 orang calon editor dari berbagai Komite Teknis/Sub Komite Teknis.
- d. Terlaksananya 2 kali workshop TAS-QC dengan masing-masing 50 peserta, yaitu:
- 1 kali workshop penyegaran bagi TAS-QC yang pernah ditugaskan, untuk memelihara kemampuan TAS-QC, menyamakan persepsi, dan menjangking masukan terhadap permasalahan terkait penugasan TAS-QC untuk perbaikan sistem
  - 1 kali workshop rekrutmen TAS-QC baru agar tersedia TAS-QC yang siap ditugaskan pada Komite Teknis/Sub Komite Teknis yang melaksanakan rapat konsensus

Tabel 6 – Tabulasi Pembinaan SDM Perumusan SNI Tahun 2013 dan 2014

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Tahun	
		2013	2014
1.	Workshop konseptor SNI *)	2	10
2.	Workshop editor penulisan SNI	2	1
3.	Workshop TAS-QC		
	a. Rekrutmen TAS-QC baru	1	1
	b. Penyegaran TAS-QC yang ada	1	1
4	Workshop pengembangan SNI di daerah **)	3	-

**Keterangan:**

\*) Pada tahun 2014, Pembinaan SDM perumusan SNI memprioritaskan untuk membina konseptor, dalam rangka meningkatkan pemahaman konseptor yang tersebar di berbagai institusi. Penurunan penyelenggaraan workshop editor dikarenakan pada umumnya editor di Komtek/Sub Komtek telah mendapatkan pelatihan ini di tahun-tahun sebelumnya.

\*\*\*) Pada tahun 2014, tidak dilaksanakan penyelenggaraan workshop pengembangan SNI di daerah mengingat kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi – BSN.

**4. Evaluasi Kinerja Komite Teknis:**

- a. Terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja Komtek/SubKomtek melalui pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek untuk kinerja pada kurun waktu antara 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Maret 2014, yang terdiri dari:
- sosialisasi ke Komtek,

- penyampaian form evaluasi kinerja ke Komtek,
  - *desk assessment*,
  - kunjungan lapangan ke 71 Komtek,
  - rapat pembahasan dan penilaian terhadap 87 Komtek, dan
  - rapat pembahasan 3 nomine dan penerima HTCA oleh MTPS.
- b. Terlaksananya kegiatan Penganugerahan HTCA dan Temu Komtek tahun 2014, yaitu :
- Penganugerahan HTCA tahun 2014 oleh Menristekdikti pada tanggal 12 November 2014 dalam acara pembukaan Bulan Mutu Nasional 2014 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center-JCC, yakni:
    - kategori Sekretariat Komite Teknis terbaik diraih oleh Sekretariat Balitbang Kementerian PU selaku Sekretariat PT 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil.
    - kategori Komite Teknis perumusan SNI terbaik juga diraih oleh PT 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil.

**Tabel 7 – Penerima Anugerah Herudi Technical Committee Award (HTCA) Tahun 2008-2014**

No	Tahun penyelenggaraan HTCA	Penerima HTCA *)
1.	2008	PT 65-05 Produk Perikanan
2.	2009	PT 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
3.	2010	PT 17-01 Pengukuran Radiasi
4.	2011	PT 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil
5.	2012	PT 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil
6.	2013	PT 65-05 Perikanan Budidaya
7.	2014	Komite Teknis 91-01 Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil.

**Keterangan:**

\*) Istilah Komite Teknis digunakan sejak disahkannya UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sebelumnya digunakan istilah Panitia Teknis (PT)

- Penyelenggaraan kegiatan Temu Komite Teknis Perumusan SNI tahun 2014, yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2014 dengan jumlah peserta 100 orang, dengan mengambil tema “Tantangan Pengembangan SNI untuk menghadapi era pasar bebas ASEAN”. Dalam kegiatan ini, BSN mengundang seluruh Komite Teknis dan Sub Komite Teknis Perumusan SNI yang ada pada saat ini, yaitu 89 Komite Teknis dan 37 Sub Komite Teknis. Adapun materi yang disampaikan adalah sbb:

- Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- Kebijakan Pengembangan SNI dalam Mendukung Penerapan UU No. 20 Tahun 2014;
- Revisi Pedoman Pengembangan SNI Pasca Undang-undang No. 20 Tahun 2014;
- Sinergi Kebijakan Standardisasi Lintas Sektor Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- Pemaparan analisa hasil evaluasi kinerja Komite Teknis tahun 2014.

Tabel 8 – Evaluasi Kinerja Komtek/SubKomtek SNI Tahun 2013 dan 2014

No	Kegiatan yang dilaksanakan	Tahun	
		2013	2014
1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja		
	a. Komtek	19	87
	b. SubKomtek	6	-
2.	Pelaksanaan kunjungan lapangan	25	71
3.	Pelaksanaan <i>desk assessment</i> *)	52	98
4.	Penerima HTCA		
	a. Nomine Komtek	5	6
	b. Penerima penghargaan tertinggi **)	1	2

**Keterangan:**

\*) Pada tahun 2013 hanya dilaksanakan *desk assessment*

\*\*) Pemberian Penghargaan Tertinggi HTCA tahun 2014 diberikan dalam dua kategori, yaitu:  
 - Sekretariat Komite Teknis Perumusan SNI berkinerja Terbaik  
 - Komite Teknis Perumusan SNI berkinerja Terbaik

**5. Fasilitasi Harmonisasi SNI:**

Terlaksananya 31 RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional (dari target 30 RSNI) dalam rangka menindaklanjuti komitmen kesepakatan yang ada di ASEAN (pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015). Dukungan yang diberikan oleh BSN dalah dalam bentuk fasilitasi untuk penyelenggaraan rapat teknis dan rapat konsensus bagi Komtek/SubKomtek yang mempunyai ruang lingkup SNI yang harus diharmonisasikan dengan standar internasional yang relevan.

Tabel 9 – Pelaksanaan Fasilitas Harmonisasi SNI Tahun 2013 dan 2014

No	Komite teknis	Tahun	
		2013 (SNI)	2014 (SNI)
1.	17-01 Pengukuran radiasi	8	-
2.	19-01 Uji tak rusak	12	-
3.	11-05 Peralatan Kesehatan berbasis IPTEK nuklir	10	-
4.	83-01 Industri karet dan plastik	10	4
5.	83-01 S2 <i>Crumb rubber</i>	-	4
6.	13-02 Keselamatan pemanfaat tenaga listrik	4	-
7.	29-02 Perlengkapan dan sistem proteksi listrik	4	4
8.	11-03 Peralatan kesehatan	2	5
9.	33-02 Telekomunikasi	-	8
10.	79-01 Hasil hutan kayu	-	6
	<b>Jumlah SNI Harmonisasi</b>	<b>50</b>	<b>31</b>

Dari sisi dukungan kegiatan kerjasama standardisasi untuk mencapai target tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI sebesar 70 %, upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kerjasama baik di tingkat nasional (kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan pihak swasta) dan internasional (kerjasama bilateral, regional dan multilateral).

Keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan Deputi PKS juga dikontribusikan oleh pencapaian target dari tiap kegiatan yang ada di Pusat Kerjasama Standardisasi (PKS) sebagai berikut:

#### 1. Kerjasama Standardisasi Dalam Negeri

Dalam kerangka pengembangan dan pembinaan standardisasi dalam negeri, BSN sampai dengan tahun 2014 telah menandatangani 21 dokumen Kesepakatan Bersama ataupun Perjanjian Kerjasama dengan organisasi pemerintah maupun swasta selaku pemangku kepentingan di bidang standardisasi.

Kesepakatan bersama tersebut di atas ditandatangani dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu: Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Tasikmalaya dan Sumedang. Kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dengan menerapkan SNI yang relevan. Implementasi kegiatan tersebut mencakup fasilitasi dan bimbingan penerapan SNI.

Di samping itu juga telah ditandatangani kesepakatan bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Puslitbang Polri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), PT. Artajasa Pembayaran Elektronik, LPPOM

MUI, LKBN ANTARA, KADIN DKI Jakarta, Konsorsium BSN-MASTAN-GAPMMI, dan PT Citra Bakti Indonesia. Sementara itu dengan kalangan perguruan tinggi sampai tahun 2014 telah ditandatangani 32 kesepakatan bersama. Kesepakatan kerjasama tersebut untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam kegiatan standardisasi, terutama yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan SNI.

Rekapitulasi hasil-hasil penandatanganan dan implementasi kesepakatan bersama disajikan pada Tabel 10 dan Tabel 11.

**Tabel 10 – Tabulasi Kegiatan Penjajakan dan Penandatanganan Kerjasama dengan Mitra Kerja (2012-2014)**

No	Mitra Kerja	2012		2013		2014	
		Rencana	realisasi	Rencana	realisasi	Rencana	Realisasi
1	Sumatera Selatan	-	-	-	-	1	2
2	Kadin DKI Jakarta	-	-	-	-	0	1
3	Pemprov. Jawa Tengah	-	-	-	-	1	1
4	Sulawesi Selatan (penandatanganan)	-	-	-	-	1	1
5	Tasikmalaya	-	-	-	-	1	1
6	Jawa Barat (penjajakan)	2	1	-	-	-	-
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan (penjajakan & penandatanganan)	-	-	0	2	-	-
8	Kepulauan Bangka-Belitung (Penandatanganan)	-	-	0	1	-	-
9	Lampung	-	-	1	0	-	-
10	LPPOM MUI (penjajakan & penandatanganan)	-	-	0	2	-	-
11	Nusa Tenggara Barat (penjajakan & penandatanganan)	2	2	-	-	-	-
12	Perum. ANTARA	-	-	0	1	-	-
13	PT. CBI	-	-	0	1	-	-
14	Sulawesi Utara (penjajakan & penandatanganan)	-	-	1	2	-	-
15	Sumatera Utara (penjajakan)	-	-	1	0	-	-

Implementasi dari kesepakatan bersama tersebut diatas dilakukan dalam bentuk sosialisasi/workshop/seminar kerjasama standardisasi dengan topik terkait standardisasi seperti peran standardisasi bagi peningkatan daya saing produk unggulan daerah, penerapan SNI bagi UKM produk unggulan daerah, regulasi berbasis SNI, sertifikasi produk untuk UMKM, penerapan SNI pada produk olahan Makanan dan minuman, dan sistem manajemen energi.

Tabel 11 – Tabulasi Kegiatan Implementasi MoU dengan Pemda (2012-2014)

No	Daerah	2012		2013		2014	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Sumatera Selatan	-	-	-	-	4	4
2	Tasikmalaya	-	-	-	-	3	3
3	Sulawesi Utara (Manado & sekitarnya)	-	-	5	3	3	3
4	Kepulauan Bangka-Belitung (Pangkal Pinang & sekitarnya)	-	-	2	2	6	5
5	Bali (Denpasar & sekitarnya)	10	2	8	6	8	6
6	Nusa Tenggara Barat (Mataram & sekitarnya)	4	3	7	4	4	3
7	Kalimantan Barat (Pontianak & sekitarnya)	6	4	12	6	4	3
8	Sumedang	4	3	2	2	2	2
9	Kalimantan Timur (Samarinda/Balikpapan & sekitarnya)	7	7	8	5	2	1
10	Sulawesi Selatan (Makassar & sekitarnya)	12	12	16	14	11	8
11	Jawa Timur (Surabaya & sekitarnya)	12	17	17	15	13	9

Kegiatan kerjasama standardisasi di dalam negeri juga ditujukan untuk mengidentifikasi kebutuhan akan standar, mendorong partisipasi pelaku usaha di daerah untuk ikut dalam kegiatan pengembangan standar, meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung daya saing produk nasional melalui pengembangan standar. Faktor-faktor yang dapat menjadi bahan pertimbangan antara lain kesiapan infrastruktur mutu di daerah, produk unggulan daerah, kondisi geografis yang sifatnya spesifik, dukungan sarana teknologi informasi, dll.

Untuk memperkuat posisi nasional di dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC dimana Indonesia mempunyai kepentingan, telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan *Nasional Mirror Committee* (NMC). Kegiatan ini untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam perumusan standar internasional dimana kegiatan ini membuka kesempatan luas bagi stakeholder nasional untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perumusan standar internasional; menciptakan media pembelajaran bagi stakeholder dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) terkait kegiatan perumusan standar internasional; dan membangun kepercayaan diri stakeholder nasional dalam persaingan bisnis global. Anggota NMC bertugas mengikuti perkembangan kegiatan

teknis *technical committee* di ISO dan IEC; memberikan tanggapan draft standar Internasional baik standar baru maupun revisinya; menghadiri sidang *technical committee* bila diperlukan; dan melakukan sosialisasi hasil sidang *technical committee*. Pada tahun 2014, terdapat 26 *technical committee* yang dipilih dan dikelola menjadi *National Mirror Committee* di BSN.

## 2. Kerjasama Standardisasi Internasional

Kerjasama standardisasi internasional difokuskan pada kerjasama di fora bilateral, regional dan multilateral. Kinerja untuk masing-masing fora kerjasama diuraikan sebagai berikut :

### a. Kerjasama Forum Bilateral

Kerjasama bilateral dilakukan dengan badan standardisasi nasional negara mitra (NSB) maupun dengan organisasi pengembang standar (SDO). Pada tahun 2014, BSN telah menandatangani 3 MoU dengan *National Standardization Bodies* (NSBs) dan *Standard Development Organizations* (SDOs), yaitu: GSO-Regional Timur Tengah; JISC-Jepang; dan MCIA-Timor Leste. Namun demikian, pada periode tahun sebelumnya, BSN telah menandatangani MoU dengan 7 NSBs (SASO-Arab Saudi; UZSTANDARD-Uzbekistan; BSB-Bhutan; KATS-Korea; BSI-Inggris; ISIRI-Iran; dan TSE-Turki) dan 2 SDO (ASTM International-Amerika Serikat; IAPMO). Secara keseluruhan, sampai dengan tahun 2014, BSN telah menandatangani 12 MoU dengan NSBs/SDOs.

Selain MoU yang sudah disepakati dan diimplementasikan, BSN juga melakukan perintisan kerjasama dengan SOSMT-Slovakia; GOST R-Rusia; MEDT-Ukraina; dan BIS-India. Untuk implementasi MoU tahun 2014, BSN bekerjasama dengan IAPMO menyelenggarakan Seminar *World Plumbing Day* dengan tema: *Water for Indonesia Now*.

Kerjasama di forum bilateral mendukung pengembangan standar melalui tukar menukar informasi mengenai pengembangan standar di Negara/SDO/NSB yang menjadi mitra Indonesia/BSN. Hal ini ditindaklanjuti dengan merekomendasikan pengembangan standar melalui adopsi standar ke dalam standar nasional.

### b. Kerjasama Forum Regional

Kerjasama forum regional difokuskan kepada forum kerjasama ASEAN dan APEC. Menuju *ASEAN Economic Community 2015*, upaya harmonisasi standar telah dilakukan untuk 6 (enam) sektor prioritas yaitu elektronika dan kelistrikan, perawatan kesehatan (obat, obat tradisional, kosmetik dan alat kesehatan), otomotif, produk berbasis karet, produk berbasis kayu, dan produk berbasis hasil pertanian.



Dalam kegiatan kerjasama standardisasi di tingkat ASEAN melalui *ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ)* tersebut di atas, BSN bertindak sebagai koordinator nasional dalam mengkonsolidasikan posisi Indonesia yang berkaitan dengan harmonisasi standar, saling pengakuan hasil penilaian kesesuaian dan harmonisasi regulasi teknis. Di samping itu BSN juga bertindak sebagai Sekretaris untuk *ACCSQ Product Working Group (PWG) on Automotives (APWG)* sejak Maret 2005 sampai dengan sekarang, dan *ACCSQ PWG on Prepared Foodstuff (PPFWG)* sejak April 2003 sampai dengan sekarang. BSN juga bertindak sebagai *Contact Point Joint Sectoral Committee on Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE)*. Di kegiatan ACCSQ yang lain, BSN juga berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan *ACCSQ Plenary; PFPWG; APWG; JSC EEE; Rubber Based Product Working Group (RBPWG) dan Medical Devices Product Working Group (MDPWG)*.

Dalam forum APEC, BSN berpartisipasi aktif dalam sidang-sidang pleno *APEC Sub Committee on Standards and Conformance (APEC SCSC)* dan ditunjuk untuk melaksanakan proyek APEC mengenai *Multilateral Recognition Arrangement (MLA) Readiness Budget in Person Certification* yang dibiayai oleh APEC dalam rangka *capacity building* di bidang standar dan penilaian kesesuaian untuk negara-negara anggota APEC.

Forum kerjasama regional selain ASEAN dan APEC dimana BSN aktif berpartisipasi di antaranya adalah *Pasific Asia Standard Congress (PASC)* dan *ASEAN-RCEP (ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership)*. PASC merupakan organisasi standardisasi Asia Pasifik yang merundingkan konsolidasi posisi standardisasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Sedangkan organisasi ASEAN-RCEP adalah merundingkan rencana pengintegrasian ekonomi 10 negara ASEAN dengan 6 negara mitra utama, yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Australia dan Selandia Baru.

#### c. Kerjasama Forum Multilateral

Kerjasama forum multilateral difokuskan pada penguatan posisi Indonesia khususnya dalam kontribusi dan partisipasi aktif Indonesia dalam perumusan standar internasional ISO dan IEC, serta memfasilitasi kerjasama dalam mendukung perumusan SNI, dan implementasinya dalam mendukung perdagangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait baik kementerian/lembaga maupun pihak swasta.

Pada tahun 2014, di bidang elektronika dan kelistrikan Indonesia menyelenggarakan seminar dalam rangka kunjungan Presiden IEC. Hal ini

dimanfaatkan sebagai forum pertemuan stakeholder bidang elektronika dan kelistrikan yang dihadiri lebih dari 100 peserta. Pertemuan ini menyimpulkan pentingnya standarisasi internasional untuk mencapai kondisi *one test, one certification, accepted in many countries*. Untuk itu, para pemangku kepentingan di Indonesia harus lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan standarisasi internasional.

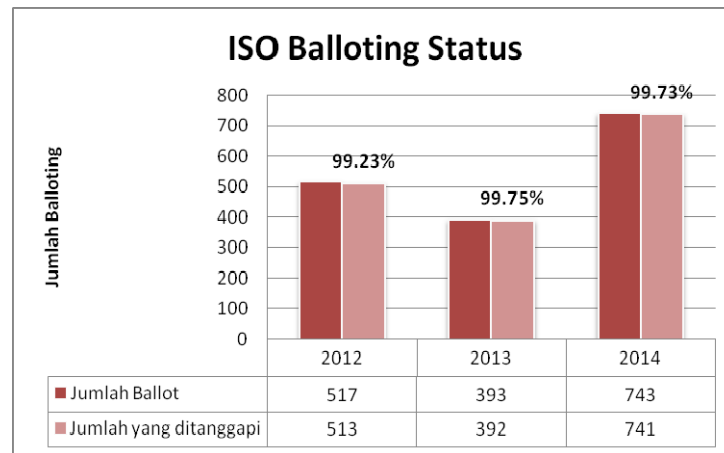
Di tahun 2014 Indonesia juga berpartisipasi dalam *Round table on new approaches to standards development* dan *training workshop*; penyusunan *White paper IEC* tentang *Future Vision of Transmission & Distribution (T&D) System and emerging Technology* melalui sistem *teleconference* dan Indonesia berkomitmen untuk melindungi IPR IEC melalui penandatangan kesepakatan perlindungan IPR.

Salah satu syarat menjadi anggota *International Electrotechnical Commission (IEC)* adalah membentuk komite nasional (*national committee*) bidang elektronika dan kelistrikan. BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan standarisasi membentuk Komite Nasional untuk IEC (KOMNAS IEC) Indonesia yang beranggotakan wakil-wakil dari para pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2014 KOMNAS IEC telah menghasilkan Rencana Strategis (RENSTRA) KOMNAS IEC tahun 2014-2019 dan harmonisasi antara Komite Teknis perumusan SNI berbasis *International Classification of Standard (ICS)* dengan Komite Teknis Internasional.

Dalam forum pengembangan standar ISO dan IEC, BSN berperan aktif dalam memberikan tanggapan terhadap draft standar internasional. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keberterimaan SNI. Selama tahun 2014, BSN telah memberikan tanggapan sebanyak 743 buah atas draft ISO (99,73 %) dan 437 buah (100 %) untuk draft IEC.

**Tabel 12 – Tabulasi Tanggapan Indonesia atas Draft Standar ISO (2012-2014)**

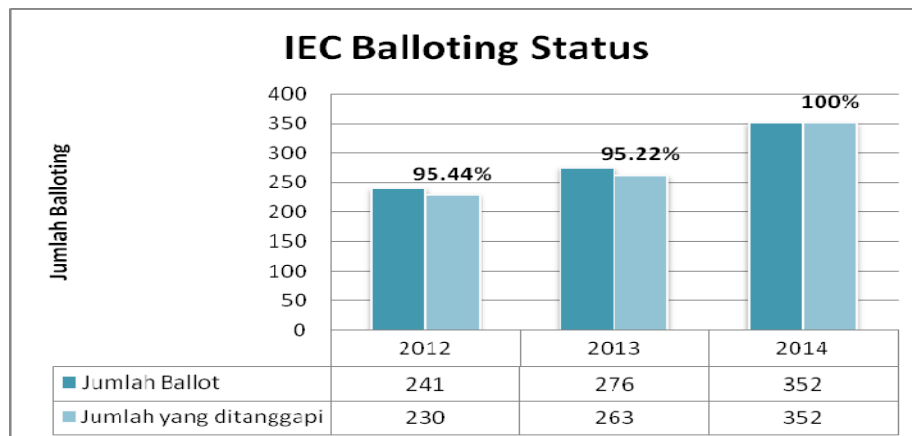
ISO			
Tahun	Jumlah <i>Ballot</i>	Jumlah yang ditanggapi	Persentase
2012	517	513	99.23 %
2013	393	392	99.75 %
2014	743	741	99.73 %



**Gambar 4 – Status pemberian tanggapan dokumen drat standar ISO**

**Tabel 13 – Tabulasi Tanggapan Indonesia atas Draft Standar IEC (2012-2014)**

IEC			
Tahun	Jumlah <i>Ballot</i>	Jumlah yang ditanggapi	Persentase
2012	241	230	95.44 %
2013	276	263	95.29 %
2014	352	352	100.00 %



**Gambar 5 – Status pemberian tanggapan dokumen drat standar IEC**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia berpartisipasi aktif sebagai anggota dalam organisasi pengembangan standar ISO dan IEC. Di kedua organisasi tersebut, status keanggotaan dibagi dua kelompok berdasarkan keaktifan serta tanggung jawabnya yaitu sebagai *Participating Member (P-Member)* dan *Observer Member (O-Member)*. Dalam Komite Teknis ISO Indonesia menjadi P-member di 25 TC/ 50 SC, dan O-Member di 110 TC/ 39 SC. Selain itu, Indonesia juga menjadi *Co-Chair twinning program ISO/TC 207/SC 1 (Environmental Management Systems)* dan *Co-Secretary twinning program* untuk ISO/TC 207/SC

7/WG 5. Dalam ISO/TC 207 *Environmental Management Working Group* (WG) 9, Indonesia mengusulkan *project Land Degradation and Desertification* (ISO 14055). Pada periode 2012 – 2014 Indonesia juga terpilih menjadi anggota ISO Technical Management Board (TMB). ISO TMB merupakan forum di ISO yang beranggotakan 14 negara mewakili lebih dari 160 negara anggota ISO. Tugas ISO TMB adalah mengelola dan mengendikan semua kegiatan pengembangan standar internasional di ISO yang dilaksanakan oleh lebih dari 300 *technical committee*.

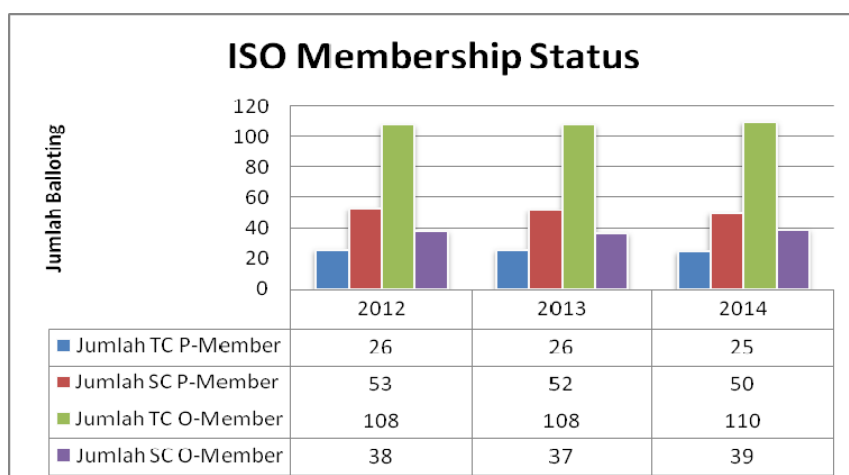
**Tabel 14 – Status Keanggotaan Indonesia di ISO (2012 – 2014)**

Tahun	P-Member		O-Member	
	TC	SC	TC	SC
2012	26	53	108	38
2013	26	52	108	37
2014	25	50	110	39

**Keterangan:**

TC = *Technical Committee*

SC = *Sub Committee*



**Gambar 6 – Status keanggotaan Indonesia dalam TC/SC ISO**

Dalam Komite Teknis IEC, Indonesia menjadi P-Member di 8 TC/ 14 SC, dan O-Member di 23 TC/ 22 SC.

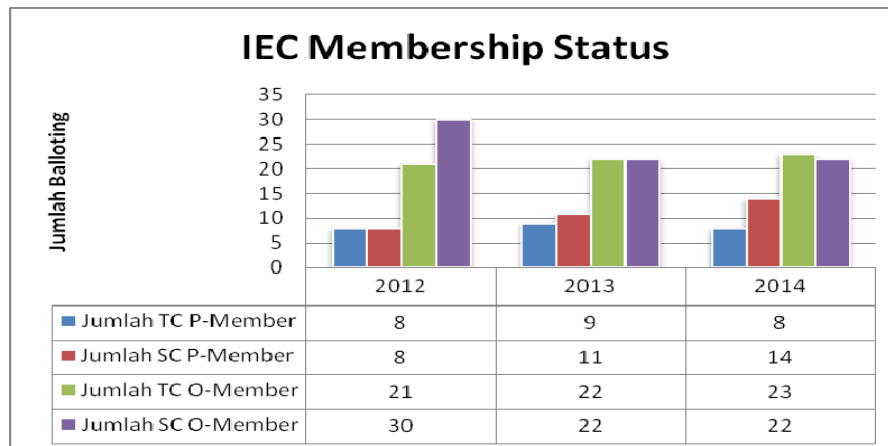
**Tabel 15 – Status Keanggotaan Indonesia di IEC (2012 – 2014)**

Tahun	P-Member		O-Member	
	TC	SC	TC	SC
2012	8	8	21	30
2013	9	11	22	22
2014	8	14	23	22

**Keterangan:**

TC = *Technical Committee*

SC = *Sub Committee*



**Gambar 7 – Status keanggotaan Indonesia dalam TC/SC IEC**

Setiap tahun Indonesia berpartisipasi aktif dalam *ISO General Assembly and its Related Meeting* dimana diperoleh informasi yang dapat dijadikan masukan untuk memperkuat sistem standardisasi nasional seperti strategi untuk mengikutsertakan UKM dalam kegiatan standardisasi; strategi untuk mengadopsi standar menjadi regulasi teknis; strategi untuk menyampaikan informasi terkait standardisasi secara efektif; strategi untuk mengelola badan standardisasi di masa mendatang; dan strategi untuk menyelenggarakan program olimpiade standardisasi.

BSN bekerja sama dengan CFCD menjadi tuan rumah *International Open Forum (IOF) and Workshop on ISO 26000 – Social Responsibility* pada tahun 2014 yang secara umum mendiskusikan pengembangan dan implementasi ISO 26000, terkait dengan tujuh prinsip dan tujuh subjek inti tanggung jawab sosial. Kegiatan ini mendukung pemahaman mengenai prinsip-prinsip dari tanggung jawab sosial agar dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran.

Dalam mendukung pengembangan SNI, BSN merintis kerjasama dengan beberapa organisasi standar dari negara lain yang standarnya banyak digunakan oleh industri dalam negeri, seperti: *ASME (American Society of Mechanical Engineers)*, *API (American Petroleum Institute)*, *NACE (National Association of Corrosion Engineers)*, *TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry)*. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung program UNIDO terkait *national awareness campaign on ISO 50001 – Energy Management System* juga telah dilaksanakan.

Dari hasil-hasil kegiatan kerjasama standardisasi baik secara nasional maupun internasional, maka sekitar 70 % dapat memberikan rekomendasi untuk mendukung perumusan SNI. Hal ini sesuai yang telah ditargetkan dalam penetapan kinerja Deputi PKS 2014.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam rangka pengembangan SNI, diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian agar pengembangan SNI yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dan sekaligus dapat mengantisipasi permasalahan yang mungkin akan dihadapi.

Keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan Deputi PKS juga dikontribusikan oleh pencapaian target 3 (tiga) kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi (Puslitbang) dalam rangka mendukung program pengembangan SNI.

Selain ketiga penelitian tersebut juga telah dilakukan 9 (sembilan) penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh para peneliti BSN. Namun demikian penelitian mandiri yang dapat dilakukan sampai selesai sebanyak 6 (enam) penelitian, sedangkan 3 (tiga) penelitian belum dapat diselesaikan secara tuntas karena keterbatasan anggaran. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, Puslitbang BSN perlu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian mandiri, sehingga penelitian mandiri semakin banyak dilakukan dan diharapkan hasil penelitian mandiri dapat memberi kontribusi yang nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi BSN.

Dari hasil-hasil penelitian tersebut 80 % kesimpulan dan rekomendasi berkontribusi untuk mendukung pengembangan SNI. Hasil penelitian yang terkait dengan kesiapan SNI dalam menghadapi *ASEAN Economic Community* (AEC) pada akhir 2015, disimpulkan bahwa dalam bidang harmonisasi SNI terhadap standar yang disepakati di AEC 2015, baru sekitar 80% dari 270 standar yang sudah diselesaikan. Oleh karena itu penelitian tersebut merekomendasikan paling lambat akhir tahun 2015 harus sudah diselesaikan 100% perumusan SNI yang harmonis standar yang disepakati di AEC 2015, yaitu untuk sektor otomotif, produk berbasis kayu, produk berbasis karet, produk elektronika dan kelistrikan, makanan siap saji dan produk perawatan kesehatan (obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika).

Sementara itu penelitian yang berkaitan dengan dampak pemberlakuan SNI wajib terhadap para pemangku kepentingan, terutam industri dalam negeri, disimpulkan bahwa masih dibutuhkan penguatan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan pemberlakuan SNI secara wajib tersebut, yaitu melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat serta dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hasil penelitian membuktikan bahwa masih terdapat produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib yang tidak memenuhi persyaratan SNI, misalnya produk lampu *swaballast*, produk ban sepeda motor, tusuk kontak listrik, dan lain-lain.

## B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian kinerja Deputi PKS, disediakan pagu anggaran awal sebesar Rp. 10.569.637.000,-, namun dalam perkembangannya mengalami perubahan karena adanya kebijakan pemerintah dalam bentuk pemotongan anggaran sebesar kurang lebih 22 % menjadi sebesar Rp 8.258.783.000,- yang merupakan bagian dari program pengurangan subsidi BBM. Secara umum gambaran realisasi serapan anggaran DIPA tahun 2014 untuk Deputi PKS adalah sesuai dengan Tabel 16.

**Tabel 16 – Pagu Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2014 Deputi PKS - BSN**

Kegiatan	Pagu awal sebelum pemotongan (Rp)	Pagu setelah pemotongan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Perumusan Standar	3.337.400.000	2.600.989.000	2.567.066.149	98,70
Kerjasama Standardisasi	4.941.837.000	3.872.780.000	3.543.108.748	91,49
Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	2.290.400.000	1.785.014.000	1.766.436.462	98,96
<b>Total</b>	<b>10.569.637.000</b>	<b>8.258.783.000</b>	<b>7.876.611.340</b>	<b>95,37</b>

Oleh karena terdapat kebijakan pemotongan anggaran untuk pengurangan subsidi BBM, maka beberapa output kegiatan di perumusan SNI disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia, antara lain fasilitasi harmonisasi SNI diubah dari 70 SNI menjadi 30 SNI. Meskipun demikian target Deputi PKS untuk pencapaian 350 RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, tetap berhasil dipenuhi, bahkan terlampaui menjadi 356 RASNI, karena didukung dengan kegiatan lainnya seperti pembinaan SDM perumusan SNI dan pengendalian proses perumusan SNI serta koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek.

Dukungan anggaran untuk kegiatan kerjasama standardisasi, walaupun mengalami pengurangan sebagian, tetapi secara umum output yang ditargetkan masih dapat dicapai. Posisi (kepentingan) Indonesia dalam penyusunan standar internasional, baik di ISO maupun di IEC secara keseluruhan dapat diwujudkan. Kendala yang paling signifikan yang terkait dengan kerjasama standardisasi adalah ketidakhadiran dalam sidang-sidang perundingan *Regional Cooperation on Economic Partnership (RCEP)*. RCEP adalah perundingan perwujudan pasar bebas antara ASEAN dengan 6 negara mitra, yaitu Cina, Jepang, Korea, India, Australia dan Selandia Baru. Dalam perundingan RCEP ini, BSN

menjadi penanggungjawab (*focal point*) untuk perundingan yang berhubungan dengan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian (*Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedure, STRACAP*). Oleh karena itu ke depan RCEP harus menjadi salah satu prioritas penanganan di bidang kerjasama internasional karena perjanjian RCEP sifatnya mengikat pemerintah Indonesia.

Pada TA 2014 anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penelitian mengalami pengurangan dari rencana anggaran awal (ada pemotongan anggaran sampai dengan 50 %). Walaupun capaian target tercapai 100 %, namun kegiatan penelitian dan pengembangan mengalami kendala dalam melaksanakan penelitian karena dengan adanya pemotongan anggaran yang cukup besar tersebut, pembahasan intensif dan penyusunan laporan penelitian tidak dapat dilaksanakan secara optimal, yang mengakibatkan analisis penelitian menjadi kurang mendalam, sehingga belum dapat dihasilkan rekomendasi yang dilengkapi dengan konsep standar-standar yang diusulkan.



## BAB IV - PENUTUP

Sasaran kinerja Deputi PKS yang utama adalah terwujudnya pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan dengan memperhatikan perkembangan perumusan standar internasional serta dengan didukung oleh hasil penelitian atas kebutuhan SNI dan dampak implementasi SNI. Capaian kinerja tahun 2014 Deputi PKS secara umum dapat diwujudkan sesuai yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Deputi PKS 2014. Dari sisi kinerja substansi, 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2014 beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

**Tabel 17 – Target dan Realisasi Kinerja Deputi PKS Tahun 2014**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2014	Realisasi 2014
1	Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	350	356
2	Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70 %	70 %
3	Tersedianya hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	Persentase kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	80 %	80 %

Walaupun terjadi pemotongan anggaran di tengah-tengah tahun berjalan, secara umum kinerja substansi utama masih dapat dicapai, yaitu output utama dari unit-unit Pusat yang ada di Deputi PKS. Walaupun demikian ada beberapa output pendukung yang belum bisa diwujudkan, misalnya fasilitasi harmonisasi untuk Komite Teknis perumusan SNI. Untuk memperbaiki kinerja substansi Deputi PKS pada tahun-tahun yang akan datang, perlu dilakukan beberapa hal, diantaranya :

- Perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan Komtek/SubKomtek yang berada di Kementerian dan Lembaga untuk memastikan proses perumusan SNI yang taat asas dan mencapai tujuan yang ditargetkan

- Kegiatan kerjasama standardisasi perlu difokuskan pada standardisasi produk potensial Indonesia dan untuk kegiatan kerjasama internasional yang sifat implementasinya mengikat pemerintah Indonesia
- Penelitian di bidang standardisasi perlu difokuskan pada penelitian pra dan pasca implementasi kebijakan pengembangan dan penerapan SNI

Dari sisi realisasi anggaran, dari anggaran awal yang tersedia sebesar Rp. 10.569.637.000,- kemudian mengalami pemotongan anggaran menjadi sebesar Rp. 8.258.783.000,-. Dari jumlah anggaran yang tersedia tersebut berhasil direalisasikan sebesar 95,37 % atau sebesar Rp 7.876.611.340,-. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebagian besar karena adanya selisih antara standar harga satuan dengan harga yang sesungguhnya di pasar, dimana sebagian besar harga realisasi lebih rendah dari harga satuan. Untuk memperbaiki kinerja anggaran pada tahun-tahun yang akan datang, perlu diperbaiki penyusunan dokumen perencanaan, terutama yang berkaitan dengan perkiraan harga atau biaya sesuai dengan kondisi saat itu.

**LAMPIRAN A**  
**Penetapan Kinerja Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi**  
**Tahun 2014**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kukuh S. Achmad  
Jabatan : Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Bambang Prasetya  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2014

Pihak Pertama

Kukuh S. Achmad

**PENETAPAN KINERJA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi  
Tahun Anggaran : 2014

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1 Meningkatnya jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar	1 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar	350
2 Tersedianya rekomendasi hasil kesepakatan kerjasama untuk pengembangan SNI	2 Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI	70%
3 Tersedianya hasil kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	3 Persentase kajian/penelitian yang mendukung pengembangan SNI	80%

Jumlah Anggaran 2014 :

Program :

- 1 Program Pengembangan Standardisasi Nasional Rp 10.569.637.000,-

Kepala Badan Standardisasi Nasional



Bambang Prasetya

Jakarta, Maret 2014  
Deputi bidang Penelitian dan  
Kerjasama Standardisasi



Kukuh S. Achmad

**LAMPIRAN B**  
**Tugas pokok dan fungsi**  
**Deputi bidang Penelitian Dan Kerjasama Standardisasi**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI** Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai fungsi :

- e. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
- f. penyusunan rencana dan program nasional di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan, perumusan dan penetapan standar nasional serta kerjasama di bidang standardisasi;
- g. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan di bidang penelitian, pengkajian, dan kerjasama di bidang standardisasi, serta pengembangan, perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- h. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang standardisasi dengan badan-badan nasional dan internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**STRUKTUR ORGANISASI** Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi.

Susunan organisasi Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi terdiri dari :

- a. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi;
- b. Pusat Perumusan Standar;
- c. Pusat Kerjasama Standardisasi

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi** Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang penelitian dan pengembangan standardisasi dalam aspek perumusan standar, penerapan standar, akreditasi, informasi dan pemasyarakatan standardisasi serta kerjasama standardisasi, dan kegiatan lain yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan standardisasi;
- d. penyusunan program dan tata operasional penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan.

**Pusat Perumusan Standar** Pusat Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun internasional

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- b. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;
- c. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
- d. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.

- Pusat Kerjasama Standardisasi** Pusat Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pusat Kerjasama Standardisasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
  - b. perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;
  - d. pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;
  - e. pelaksanaan urusan pengelolaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi standardisasi dan kerjasama dengan badan standardisasi di tingkat bilateral, regional maupun internasional;
  - f. pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan kerjasama standardisasi dalam negeri.